

TANTANGAN DAKWAH DI ERA POSTMODERNISME

*Elya Munfarida**

Abstract:

As a criticism to modernism, postmodernism has created new cultural realities different from the previous. Through its political acts and strategies, postmodernism has constructed cultural hypereality and complexity. This change becomes a chance and also threat that we need to be critical to anticipate the negative effects. One of its strategies is cultural deconstruction, which denies transcendental signs, meanings, and values, represents one of its negative effects. It will eliminate religious values which by contrast place transcendental values as its principle. For that reason, we need to contextualize Islamic teachings in order not to make postmodernism eliminate Muslims' sense of religiosity. *Da'wa*, as a means of communication and transformation of Islamic values, plays a significant role in this postmodernism era. Consequently, reconstruction of contextual da'wa strategy should be committed to balance the domination of postmodernism cultures.

Keywords:

postmodernism, capitalism, contextualization, da'wa strategy

Pendahuluan

Globalisasi informasi telah menjadikan sekat-sekat antar wilayah atau negara semakin terkikis atau bahkan telah hilang. Konflik sosial

* Penulis adalah Magister Agama UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Dosen tetap Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto.

politik, krisis ekonomi, bencana alam, bahkan sampai gaya hidup, tren busana yang terjadi dan berkembang di suatu wilayah dapat disaksikan, dirasakan dan dialami secara langsung oleh penduduk di bagian lain di dunia. Dalam bukunya yang sudah klasik, *Understanding Media, The Extensions of Man*, Marshal Mc Luhan secara optimis memprediksikan bahwa perkembangan teknologi informasi – khususnya televisi dan komputer – telah memungkinkan umat manusia hidup di dalam dunia yang disebutnya desa global. Dunia yang tidak lebih besar dari sebuah layar kaca atau disket, yang di dalamnya semua informasi dapat diakumulasikan, direproduksi dan disiarkan kembali melalui media tersebut.¹ Dalam pernyataan Mc Luhan, tersirat optimismenya terhadap peran teknologi informasi bagi perkembangan kemanusiaan.

Namun demikian, dalam perkembangannya, globalisasi informasi ternyata juga membawa ekses negatif yang terlewatkan atau luput dari prediksi Mc Luhan. Globalisasi informasi telah menimbulkan ekses over informasi (informasi yang berlebihan). Informasi diproduksi secara berlebihan (*overload*) sehingga menciptakan kondisi hyper-informasi, di mana informasi tidak lagi berfungsi mengkomunikasikan pesan untuk ditangkap maknanya dan kemudian ditransendensikan guna peningkatan kualitas hidup manusia, tapi justru menimbulkan kehampaan dan ketidakbermaknaan. Obesitas informasi yang diproduksi media telah mengaburkan realitas dan fantasi, yang benar dan yang palsu, yang bermakna dan yang tidak bermakna, yang baik dan yang buruk, yang bermoral dan yang amoral. Kondisi inilah yang disebut Jean Baudrillard dan Umberto Eco sebagai dunia hiperealitas, yakni keadaan runtuhnya realitas, yang diambil alih oleh rekayasa model-model (citraan, halusinasi, simulasi²), yang dianggap lebih nyata dari realitas sendiri, sehingga perbedaan antara keduanya menjadi kabur.³ Tayangan sinetron, Mickey Mouse, Superman

¹Yasraf Amir Piliang, *Dunia Yang Dilipat, Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), hal. 198-199.

² Simulasi (*simulation*) adalah proses penciptaan bentuk-bentuk nyata melalui model-model yang tidak ada asal-usul atau referensi realitasnya, sehingga memungkinkan manusia membuat yang supernatural, ilusi, fantasi, khayali menjadi tampak nyata. Misalnya, film kartun Superman, Batman, dunia Disneyland merupakan beberapa contoh simulasi, dimana eksistensinya bersifat ilusi atau fantasi karena tidak ada referensi realitasnya, namun tampak seperti nyata. *Ibid.*, hal 25.

³Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika, Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna* (Jogjakarta: Jalasutra, 2003), hal. 135-137. Lihat juga George Ritzer, *Teori Sosial*

dan berbagai tontonan lain yang pada dasarnya bersifat fantasi karena tidak ada referensi realitasnya, dianggap lebih nyata dari realitas sosial. Dan karena dipandang sebagai realitas, maka nilai-nilai di dalamnya diambil sebagai rujukan untuk memandangi realitas sosial yang sebenarnya. Kondisi inilah yang kemudian menciptakan kehampaan dan kegamangan manusia modern, karena objek-objek simulasi diproduksi dan direproduksi tanpa menghadirkan makna yang dapat meningkatkan spiritualitas manusia.

Transparansi informasi sebagai akibat kemajuan teknologi informasi juga menimbulkan eksekusi lain yang tidak kalah ironisnya, yakni transparansi sosial, satu kondisi lenyapnya kategori sosial, batas sosial, hierarki sosial yang sebelumnya membentuk suatu masyarakat.⁴ Masalah seksualitas, misalnya, yang dalam masyarakat tradisional dianggap tabu, sehingga untuk dapat mengaksesnya seseorang harus melalui ritual tertentu (*rites de passages* / ritus-ritus peralihan), yang menandai peralihan status belum dewasa menjadi dewasa dan lain-lain, telah lenyap dengan adanya berbagai bentuk pornografi yang secara terbuka dan transparan ditampilkan dalam majalah porno, internet, televisi dan media-media lain, yang bisa diakses dan dinikmati oleh semua kalangan termasuk anak-anak.

Bentuk-bentuk transparansi seksual dalam media ini, juga merupakan sebuah bentuk kekerasan simbolik. Bentuk kekerasan ini, sebagaimana dikembangkan oleh Pierre Bourdieu, merupakan sebuah mekanisme sosial, dimana relasi komunikasi saling bertautan dengan relasi kekuasaan.⁵ Dalam relasi kuasa ini, terjadi pemaksaan secara laten yang dilakukan oleh media terhadap dunia anak-anak. Pornografi dengan menggunakan kerangka berfikir ini, dapat dipandang sebagai kekerasan simbol yang dilakukan oleh kekuasaan tertentu terhadap anak-anak melalui bahasa media, yang mengintervensi dan mengkonstruksi dunia anak-anak dengan berbagai bentuk tampilannya. Dominasi simbol-simbol pornografi ini kemudian diinternalisasikan dalam kesadaran dan mengkonstitusikan sikap dan tindakan mereka. Akibatnya, tindakan perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan bentuk amoralitas seksual lainnya yang dilakukan anak-anak, semakin marak mewarnai kehidupan anak bangsa kita.

Postmodern, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), hal.163-164.

⁴ Yasraf Amir Piliang, *Dunia Yang...*, hal. 234.

⁵ John B. Thompson, *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2007), hal. 94-98.

Deskripsi di atas merupakan beberapa fenomena yang sedang kita hadapi di era sekarang ini. Berpijak dari realitas di atas, dalam tulisan ini penulis ingin mengelaborasi secara lebih dalam beberapa hal terkait dengan budaya posmodernisme sebagai langkah awal untuk melihat tantangan kultural yang dihadapi dakwah Islam di era posmodernisme. Pembahasan ini sekaligus juga menjadi starting point guna merekonstruksi strategi dakwah di era posmodernisme ini.

Memahami Kebudayaan Posmodernisme

Perbincangan tentang posmodernisme tidak dapat dilepaskan dari adanya kegalauan terminologis di seputar konsep posmodernisme itu sendiri, yang menunjuk pada berbagai pengertian, berbagai konteks, dan berbagai wacana; yang dibicarakan di dalam berbagai disiplin, digunakan dalam berbagai bidang, dan diklaim oleh berbagai kelompok ideologi. Tidak ada pengertian, konteks, atau wacana tunggal posmodernisme; melainkan pengertian-pengertian, konteks-konteks, dan wacana-wacana yang plural. Sehingga perbincangan tentang posmodernisme harus ditempatkan di dalam medan kegalauan terminologis tersebut.

Dalam sejarah pemikiran teori postmodernisme, terdapat beberapa dilema dalam setiap upaya mendefinisikan posmodernisme. Setidaknya ada tiga dilema filosofis yang mewarnai perdebatan tentang konsep posmodernisme, yakni: 1), epistemologi, apakah posmodernisme itu merupakan kelanjutan dari, revolusi terhadap, dekonstruksi dari, dan sebagainya, dari modernisme, 2) periodisasi, apakah posmodernisme itu sebuah rentang sejarah, serta kapan dimulainya, dan 3) definisi, apakah posmodernisme, atau lebih jauh lagi, dapatkah kita mendefinisikannya?⁶ Meskipun sangat menarik, persoalan dilematis di atas tidak akan didiskusikan secara panjang lebar dalam tulisan ini, namun hanya menampilkan beberapa konsep pemikiran yang mendeskripsikan kebudayaan posmodernisme.

Persoalan yang sama juga dirasakan oleh George Ritzer ketika akan membuat konseptualisasi posmodernisme. Dalam pemetaannya, pemikiran para tokoh yang diasosiasikan dengan posmodernisme dapat

⁶ Untuk mengetahui lebih jauh tentang perdebatan para filosof terkait dengan tiga dilema filosofis di atas, lihat Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika ...*, hal. 67-99.

diklasifikasikan dalam tiga tipe: 1) Posmodernitas merujuk pada satu epos – jangka waktu, masa, zaman-sosial dan politik yang biasanya terlihat mengiringi era modern dalam suatu pemahaman historis, 2) posmodernisme merujuk pada produk kultural dalam seni, film, arsitektur, dan sebagainya, yang terlihat berbeda dari produk kultural modern, dan 3) teori sosial posmodern merujuk pada teori sosial yang berbeda dari teori sosial modern.⁷ Jadi ide tentang posmodernisme mencakup pemikiran tentang suatu epos historis tertentu, produk kultural baru, dan tipe teoritisasi baru mengenai dunia sosial. Semua elemen posmodernisme tersebut tentu saja memiliki suatu perspektif baru baik secara sosial, kultural ataupun intelektual yang dalam perkembangannya menggantikan realitas-realitas modern.

Di antara kegalauan terminologis posmodernisme, terdapat upaya untuk menghubungkan istilah posmodernisme dengan istilah hipermodernisme. Posmodernisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kecenderungan baru pemikiran dan realitas budaya sebagai konsekuensi berakhirnya modernisme – yang ditandai oleh semakin terbatasnya gerak kemajuan (*progress*) dan kebaruan (*newness*), di dalam berbagai bidang kultural - sehingga kini kebudayaan memalingkan mukanya ke wilayah-wilayah masa lalu, dalam rangka memungut kembali warisan bentuk, simbol, dan maknanya. Hipermodernisme, sebaliknya, adalah sebuah istilah yang digunakan menjelaskan kecenderungan perkembangan modernisme ke arah yang melampaui (*hyper*) atau melewati (*beyond*), yaitu perkembangan unsur-unsur modernitas ke arah garis-garis batas yang seharusnya tidak dilewati, sehingga menggiringnya pada kondisi ekstrim.⁸

Terdapat perbedaan orientasi yang sangat jelas antara posmodernisme dan hipermodernisme, sehingga beberapa pemikir, seperti Jean Baudrillard dan Paul Virilio cenderung melihat kedua istilah itu sebagai kecenderungan yang kontradiktif: yang satu berorientasi ke masa lalu atau nostalgia, yang lain berorientasi ke masa depan atau futuristik dan utopis. Namun ada pemikir-pemikir lain, seperti J.F. Lyotard atau Charles

⁷ Keterangan lebih lanjut tentang tipologi konseptualisasi posmodernisme Ritzer dapat dilihat dalam George Ritzer, *Teori Sosial ...*, hal. 14-17.

⁸ Yasraf Amir Piliang, *Dunia Yang ...*, hal. 423-424.

Jenks, tidak melihat keduanya dalam kerangka oposisi biner, tapi dalam bingkai eklektisisme (*eclecticism*), yaitu bersatunya dua atau beberapa unsur bertolak belakang di dalam sebuah kesatuan, dengan menerima kontradiksi di baliknya. Posmodernisme, dalam pengertian ini adalah eklektisisme unsur modernitas dan hipermodernisme dengan unsur-unsur masa lalu, yang dicirikan oleh toleransi terhadap kontradiksi itu sendiri.

Perbincangan posmodernisme di dalam tulisan ini mengacu pada pemahaman posmodernisme yang terakhir, yang melihat hipermodernisme sebagai bagian dari posmodernisme. Perkembangan budaya posmodern telah menciptakan perubahan-perubahan signifikan pada apa yang disebut sebagai budaya benda (*material culture*), yang di dalamnya berkembang peran baru objek yang kini mengendalikan subyek manusia. Perubahan mendasar juga terjadi pada budaya non-material, khususnya pada tingkat ide, gagasan, mentalitas, nilai dan norma yang tergantikan oleh ide, gagasan, nilai dan norma posmodern. Pada tingkat tindakan sosial (*social action*) juga berkembang relasi sosial yang baru, ritual dan tingkah laku sosial sebagai akibat perkembangan teknologi informasi, di mana citra dan image kini menjadi pendefinisi relasi sosial dan tingkah laku sosial. Deskripsi di atas menunjukkan luasnya wilayah kajian budaya. Tulisan ini, dengan meminjam kerangka berfikir Yasraf Amir Piliang, membatasi kajian kebudayaan pada empat hal, yakni ideologi budaya, politik kebudayaan, kondisi budaya (budaya benda), dan strategi budaya.⁹

Ideologi Budaya Posmodernisme

Peralihan modernisme menuju posmodernisme ditandai dengan peralihan klaim-klaim ketunggalan, keterpusatan (*centering*), universalitas, homogenitas, dan rasionalitas ke arah klaim-klaim baru kemajemukan, ketidakterpusatan (*decentering*), relativitas, heterogenitas dan antirasionalitas. J.F. Lyotard menyebutnya sebagai peralihan dari Narasi Besar (*Grand Narrative*) yaitu ideologi-ideologi besar (Imperialisme, Marxisme, Fasisme, Etnosentrisme, Eurosentrisme, Patriarki, Rasisme) ke arah narasi-narasi kecil (*little narratives*), yaitu permainan-permainan bahasa (*language games*) yang bersifat heterogen,

⁹ *Ibid.*, hal. 424-425.

yang dimainkan di dalam institusi-institusi lokal yang plural, yang berlandaskan ideologi-ideologi lokal yang unik.¹⁰

Dengan runtuhnya narasi besar, tidak ada lagi pemisahan besar dalam kebudayaan. Yang ada hanyalah fragmentasi budaya yang bersifat lokal, etnik dan unik. Terkait dengan penolakan *great divide* dan afirmasi heterogenitas budaya, terdapat dua kecenderungan utama dalam posmodernisme. *Pertama*, posmodernisme skeptis (*skeptic post-modernism*), yang dicirikan oleh sikap anti fondasi, anti sosial, dan anti ideologi; yang dibangun di atas prinsip dekonstruksi¹¹; yang menolak segala bentuk kategorisasi ideologis dan kultural, yang melihat segala sesuatu bersifat relatif. Posmodernisme skeptis cenderung berkembang ke arah anarkisme, yang menolak segala bentuk otoritas penilaian, landasan normatif, asumsi moral, dan klaim kebenaran; yang tidak membutuhkan kriteria, aturan main, konvensi, kode, atau konsensus apapun: yang tidak memerlukan fondasi apapun, baik sosial, moral, atau spiritual.

Kedua, posmodernisme afirmatif (*affirmative post-modernism*), yang tidak anti fondasi dan anti ideologi; akan tetapi lebih mengutamakan penghargaan terhadap pluralisme dalam ideologi. Dekonstruksi tidak dipahami sebagai runtuhnya kategori, oposisi biner – sehingga tidak mungkin lagi ada klaim makna dan kebenaran – melainkan sebuah peluang bagi eksistensi narasi-narasi kecil yang sebelumnya marginal, tertekan, tersubordinasi di dalam narasi-narasi besar peradaban modern-seperti ideologi dan budaya yang berbasis lokalitas, etnisitas, keagamaan,

¹⁰ *Ibid.*, hal. 425.

¹¹ Dekonstruksi adalah sebuah istilah yang dikembangkan oleh Jacques Derrida sebagai kritik atas strukturalisme Ferdinand de Saussure. Dalam linguistik strukturalnya, Saussure mengembangkan prinsip oposisi biner antara ucapan (*Speech*) dan tulisan (*Writing*). Oposisi biner ini, dalam tradisi Barat, diikuti dengan anggapan yang pertama superior, dan menurut Derrida disebut logos-kebenaran atau kebenaran dari kebenaran. Sedangkan istilah kedua hanya perantara atau representasi palsu dari kebenaran. Tradisi inilah yang olehnya disebut logosentrisme, yakni asumsi adanya hak istimewa yang disandang oleh istilah pertama (*Speech*) dan pelecehan istilah kedua (*Writing*), yang dianggap tak lebih dari bentuk yang sudah tercemar, yang ada di luar kawasan kebenaran. Dekonstruksi, menurut Derrida, adalah penyangkalan akan oposisi ucapan/tulisan, ada/tidak ada, murni/tercemar dan penolakan terhadap kebenaran absolut dan logos itu sendiri. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika ...*, hal.125-129. Nuruddin Asyhadie, *Hampiran Hamparan Gramatologi Derrida*, (Yogyakarta: LKiS, 2004).

rasa yang kini mendapatkan ruang hidup bagi perkembangan dan eksistensinya.¹²

Dengan adanya dekonstruksi kategori-kategori ideologis dan kultural, posmodernisme menjadi sangat afirmatif terhadap keragaman budaya dan ideologi, sehingga mengkonstruksikan kebudayaan yang bersifat sangat toleran dan inklusif, yang tidak menolak segala eksistensi ideologi dan kultural dan menerima segala kontradiksi yang ada di dalamnya. Afirmasi terhadap fragmentasi budaya dan dekonstruksi oposisi biner juga menciptakan adanya peleburan dan sinkretisme budaya atau ideologi antara *high culture/low culture*, Barat/Timur, rasional/irasional, sehingga klaim-klaim nilai tinggi/rendah, luhur/murahan, moral/amoral, indah/tidak indah, realitas/fantasi menjadi tidak relevan lagi.

Politik Kebudayaan Posmodernisme

Posmodernisme juga bisa dilihat sebagai sebuah kecenderungan politik kebudayaan, yaitu bagaimana kebudayaan kini berhimpitan dengan kekuasaan, yang di dalamnya ada kecenderungan-kecenderungan baru beroperasinya kekuasaan dalam kebudayaan. Intervensi politis dalam kebudayaan dapat dijelaskan dalam empat kecenderungan:¹³

1. Politik Konsumsi

Kecenderungan kapitalisme telah mengalami pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) yang mengiringi perubahan kondisi sosial. Perubahan masyarakat dari orde *industrial* yang merupakan cermin masyarakat modern ke orde *post industrial* yang menjadi cermin masyarakat posmodern juga diiringi oleh pergeseran kecenderungan kapitalisme sebagai upaya mereposisi kekuasaannya. Penekanan pada kontrol produksi di era *industrial* bergeser pada penekanan pada kontrol konsumsi pada era *post industrial*. Pada orde *post industrial*, masyarakat didorong untuk terus menerus mengkonsumsi komoditas-komoditas yang ditawarkan oleh para kapitalis. Penguasaan atau kontrol atas alat konsumsi,¹⁴ sebagaimana

¹² Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang...*, hal. 426.

¹³ *Ibid.*, hal. 427-429.

¹⁴ Elaborasi lebih jauh tentang alat konsumsi dan kontrol terhadapnya oleh kapitalisme mutakhir dapat dilihat dalam George Ritzer, *Teori sosial ...*, hal. 372-376.

penguasaan terhadap alat produksi di era industrial, menjadi sarana untuk menggiring konsumen mengkonsumsi menurut cara yang diinginkan produser.

Dengan menggunakan istilah 'rasionalitas teknologis' untuk menandai karakter rasionalitas zaman sekarang, Herbert Marcuse mengkritik kebudayaan kontemporer yang memandang segala hal secara rasional sejauh dapat diperalat, dimanipulasi, dimanfaatkan dan diperhitungkan secara matematis dan ekonomis. Melalui rasionalitas ini, penataan masyarakat semakin bersifat rasional, produktif, teknis dan total, tetapi dalam kondisi demikian setiap perubahan kualitatif pada sistem harus disingkirkan. Kontrol teknologis ini telah menjebak masyarakat secara total, baik dalam wilayah fisik maupun psikis, yang sering kali tidak mereka sadari. Dalam bidang ekonomi, misalnya kelimpahan produksi telah membuka alternatif seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menikmati berbagai komoditas sesukanya. Namun hal ini hanya bersifat superfisial saja, karena masyarakat hanya menginginkan apa yang dikehendaki sistem agar ia diinginkan. Dengan cara ini, proses produksi terus berlangsung dan manipulasi pun melangsungkan dirinya.¹⁵

Dalam kondisi ini, masyarakat posmodern berubah menjadi masyarakat konsumen. Masyarakat konsumen adalah masyarakat yang menjadikan konsumsi sebagai ideologi, yaitu bagaimana nilai dan makna kehidupan, aktualisasi diri diperoleh melalui tindak konsumsi. Objek komoditi kini tidak lagi dikonsumsi atas dasar logika utilitas, nilai dan kegunaannya, tapi untuk menandai prestige, simbol dan status sosial tertentu. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa relasi subyek dan obyek di dalam masyarakat konsumen dapat dipandang sebagai relasi konsumsi semata-konsumer *par-excellence*. Dalam kondisi demikian, pernyataan filosofis Cartesian "*Cogito Ergo Sum*" (Aku berpikir, karenanya aku ada), semakin kehilangan makna sebab realitas sosial yang berkembang hanya

¹⁵ Herbert Marcuse, *Manusia Satu Dimensi*, (Yogyakarta: Bentang, 2000), hal. 1-27. Kritik terhadap rasionalitas modern juga menjadi perhatian para pemikir mazhab Frankfurt yang sering diasosiasikan sebagai mazhab kritis. Untuk keterangan lebih lanjut tentang persoalan ini, lihat Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*, (Yogyakarta: Buku Baik, 2003).

dapat diungkapkan dengan pernyataan “Aku mengkonsumsi, karenanya aku ada”. Di sini subyek menginternalisasikan nilai-nilai sosial budaya obyek-obyek melalui tindakan konsumsi.¹⁶ Atau dengan meminjam pernyataan Herbert Marcuse, manusia mengenal diri mereka sendiri dalam komoditas-komoditas yang mereka konsumsi; mereka menemukan jiwa mereka di dalam otomobil, hi-fi set, rumah mewah, serta peralatan dapur yang mereka miliki.¹⁷

2. Politik Tontonan

Masyarakat posmodern adalah masyarakat tontonan (*society of the spectacle*), yang di dalamnya tontonan (berupa televisi, hiburan, musik, iklan) menjadi titik pusat kehidupan budaya. Tontonan (dan citra di dalamnya) menjadi penentu relasi di antara kelompok-kelompok sosial, apakah itu relasi kelas, status atau gaya hidup. Tontonan adalah momen ketika komoditi mencapai tingkat penguasaan total terhadap kehidupan sosial (makna, nilai, norma, kepercayaan). Tontonan adalah cara manusia posmodern memaknai hidup, yang menjadi acuan nilai dan moral masyarakat. Padahal, tontonan adalah ilusi yang ditanamkan pada objek tontonan, tetapi ilusi itu mengendalikan persepsi dan kesadaran masyarakat. Masyarakat posmodern menjadi masyarakat ilusi (*society of the illusion*), yang merayakan ilusi ketimbang realitas. Tontonan telah menjajah semua aspek kehidupan masyarakat. Hal-hal yang dulu

¹⁶ Konsumsi sebagai sebuah diskursus telah dikaji dalam berbagai disiplin. Konsumsi bisa dipandang sebagai sebuah proses objektivikasi, yaitu proses eksternalisasi dan internalisasi diri lewat objek-objek sebagai mediana. Di sini, terjadi proses menciptakan nilai-nilai melalui objek, dan kemudian memberikan pengakuan terhadap nilai-nilai tersebut (sublasi) serta menerimanya (internalisasi). Dari sudut pandang linguistik, konsumsi dapat dipandang sebagai satu proses menggunakan atau mendekonstruksi tanda-tanda yang terkandung di dalam objek-objek oleh para konsumen, dalam rangka menandai relasi-relasi sosial. Dalam hal ini, objek dapat menentukan status, prestise dan simbol-simbol sosial tertentu bagi para pemakainya. Sementara dalam kajian psikoanalisis, konsumsi dipandang sebagai satu proses reproduksi hasrat (*desire*) dan reproduksi pengalaman bawah sadar yang bersifat primordial. Dalam hal ini, konsumsi mengingatkan seseorang kembali pada rangsangan-rangsangan bawah sadar yang pertama kali dialami pertama kali secara primordial dalam bentuk kesenangan seksual yang muncul pertama kali dalam berhubungan dengan objek seksual (menyusui). Konsumsi adalah substitusi atau pengganti dari kesenangan yang hilang tersebut, yang tersimpan dalam bentuk bawah sadar. Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika ...*, hal. 144-145.

¹⁷ Herbert Marcuse, *Manusia Satu ...*, hal 13.

dianggap tidak penting (hiburan, gosip, kuis) kini menjelma menjadi sesuatu yang paling penting dari yang lainnya (politik, sosial, ritual).¹⁸

Media massa, khususnya televisi, internet, telah menjelma menjadi 'agama baru'. George Gerbner menyebut televisi sebagai agama masyarakat industri.¹⁹ Seperti layaknya sebuah agama yang memiliki doktrin, praktek ritual, jama'ah dan kekuatan mobilisasi sosial, media kontemporer seperti televisi, internet, juga memiliki doktrin-doktrin tertentu berupa program-program film, sinetron dan iklan, yang mampu meyakinkan masyarakat selaku jama'ahnya untuk menerima dan menginternalisasikan nilai-nilai yang ditawarkan secara *taken for granted*, sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Berbagai program yang disiarkan diikuti secara khidmat layaknya mengikuti ritus-ritus religius. Efektivitasnya dalam memobilisasi massa, juga menjadi satu sarana yang signifikan bagi kekuasaan ideologis tertentu untuk mendapatkan legitimasi dan penerimaan publik.²⁰

3. Politik Tanda

Budaya posmodern adalah budaya tanda (*sign culture*) dalam bentuknya yang baru, yang dapat dijelaskan lewat lima karakter berikut. *Pertama*, sifatnya yang ironis, absurd, paradoksal, dekonstruktif, yang di dalamnya tanda digunakan bukan untuk menyampaikan pesan, tapi menampakkan kelucuan, kegilaan dan paronia. *Kedua*, merayakan eksese, disebabkan motif penggunaan tanda di dalamnya bukanlah motif pengiriman pesan, melainkan sesuatu yang berada di luar relasi komunikasi: *noise*, gangguan,

¹⁸ Yasraf Amir Piliang, *Dunia Yang ...*, hal. 428.

¹⁹ Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 53-55.

²⁰ Dalam *Selections From Prison Notebooks*, Antonio Gramsci, seorang pemikir marxis Italia, menjelaskan bahwa konsep hegemoni tidak hanya terdapat dalam relasi antar kelas politik (*ruling class/rulled class*), tapi juga relasi-relasi sosial yang lebih luas, seperti relasi gender, ras, agama, bahkan gaya hidup. Hegemoni ini bisa dicapai dengan melakukan dominasi politik lewat kekuatan juga dominasi kepemimpinan intelektual dan moral. Dengan demikian, sebuah sistem kekuasaan akan tetap eksis status quonya sepanjang ada kombinasi antara kekuatan dan penerimaan publik yang berlangsung lewat mekanisme kepemimpinan intelektual dan moral. Alat hegemoni, seperti sekolah, gereja, masjid, media massa, bahkan arsitektur atau nama jalan, memiliki peran sentral dalam menyampaikan ide-ide hegemonis tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut politik media lihat, Yasraf Amir Piliang, *Transpolitika: Dinamika Politik Di Dalam Era Virtualitas*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), 213-228.

disinformasi, simulasi, *chaos* dan *disorder*. *Ketiga*, merayakan permainan tanda, lewat penolakan posmodernisme terhadap strukturalisme dalam bahasa, yang dianggap telah menutup kemungkinan tafsiran kreatif dalam bahasa, yang hanya dapat dicari jalan keluarnya lewat permainan bebas tanda. *Keempat*, merayakan permainan medium, sehingga kini medium itu sendiri telah menjadi pesan (*medium is the message*). Motif komunikasi telah beralih dari pencarian pesan ke arah keterpesonaan yang ditimbulkan oleh permainan, teknik, dan kecanggihan media atau disebut ekstasi komunikasi. *Kelima*, turbulensi tanda, dengan mentolerir kegalauan dalam sistem pertandaan, yang menciptakan model semiotika skizofrenia, berupa keterputusan rantai pertandaan (antara penanda dan petanda, atau antara penanda dan penanda lainnya).²¹

4. Politik Citra

Citra (*image*) dan pencitraan (*imagology*) merupakan strategi utama di dalam sistem produksi dan konsumsi posmodern, yang di dalamnya konsep, gagasan, tema, atau ide-ide dikemas dan ditanamkan pada objek konsumsi. Dalam *History of Sexuality*, Foucault mengatakan bahwa kekuasaan ada di mana-mana,²² tidak hanya terbatas pada kekuasaan aparat ideologi negara dalam bahasa Louis Althusser. Lebih lanjut kekuasaan, menurutnya, tidak hanya dilanggengkan melalui cara-cara represif, tapi melalui tawaran-tawaran akan berbagai bentuk pengetahuan dan kesenangan. Dalam perspektif ini, citra dapat dilihat sebagai sebentuk pengetahuan yang diproduksi kekuasaan kapitalisme untuk melanggengkan status quo. Citra digunakan sebagai alat pengendalian massa konsumen, yakni pengendalian selera, gaya hidup, tingkah laku, serta imajinasi-imajinasi kolektif mereka oleh sekelompok elit (kapitalis), lewat berbagai ilusi-ilusi yang diciptakannya.

Dalam artikelnya "*The Age of the World Picture*", Heidegger menyatakan bahwa di dalam abad citraan, ada semacam virus baru yang mengkontaminasi Sang Diri, berkaitan dengan reduksi Sang Ada (*Being*) menjadi tak lebih dari citraan, dan reduksi

²¹ Yasraf Amir Piliang, *Dunia Yang ...*, hal. 428-429.

²² *Ibid.*, hal. 112-113.

historis ini akan membentuk cara kita memandang dunia dan diri kita. Kita diikat dan dihegemoni oleh citraan sehingga kita teralienasi dari diri kita sendiri. Peleburan diri kita dalam totalitas citraan akan mengaburkan kapasitas kita dalam membentuk diri yang otentik,²³ subyektivitas yang benar terhadap diri kita sendiri.

Sebagai sebuah diskursus, kebudayaan citra telah menguasai Sang Ada. Ada meleburkan dirinya menjadi citraan, menjadi kehendak memproduksi dan menguasai citraan, kehendak untuk memperlihatkan kekuasaan melalui produksi, sirkulasi dan konsumsi citraan-citraan.²⁴ Dalam kondisi ini, manusia telah kehilangan diri dan keotentikannya, karena eksistensi dirinya telah melebur dalam lautan citraan. Keberadaannya yang tidak otonom, menjadikannya, dalam istilah Erich Fromm sebagai manusia automaton,²⁵ yakni manusia yang kehilangan hakikat dirinya yang hidup dan berfikir seperti mesin dan serba otomatis, karena dikendalikan oleh realitas eksternal (citraan-citraan).

Strategi Kebudayaan Posmodernisme

Perkembangan posmodernisme sebagai sebuah wacana kebudayaan, telah membawa berbagai perubahan yang radikal pada apa yang disebut “kebudayaan”. Kebudayaan posmodern telah memutarbalikkan kategori kebudayaan; telah mengaduk-aduk bentuk-

²³ Dalam filsafat eksistensialismenya, Martin Heidegger menyatakan bahwa eksistensi manusia bersifat bebas. Kebebasan ini yang menjadikan totalitas dirinya menjadi miliknya sendiri, sehingga ia menjadi otentik. Kebebasan eksistensial manusia tidak boleh diintervensi atau dihegemoni oleh kekuasaan eksternal apapun. Dengan menggunakan perspektif ini maka eksistensi manusia adalah ada-dalam-dunia (*in-der-welt-sein*), artinya mengadanya manusia tidak dapat dipisahkan dari dunianya. Dunia dalam hal ini terpusatkan pada manusia (*Dasein*), sehingga setiap relasi manusia dengan realitas di luar dirinya selalu ditandai oleh subyektivitasnya. Karenanya, meskipun eksistensi manusia berada dalam determinisme sosial kultural, tapi pengalaman pribadinya selalu dialami secara personal. Untuk keterangan lebih jauh tentang filsafat eksistensialisme Martin Heidegger, lihat Zainal Abidin, *Filsafat Manusia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 153-167.

²⁴ Yasraf Amir Piliang, *Dunia Yang ...*, hal. 166-169.

²⁵ Erich Fromm, “Mendidik Si Automaton”, dalam Omi Intan Naomi (Peny.), *Menggugat Pendidikan*, Terj. Omi Intan Naomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 343-353.

bentuk kebudayaan; telah menjungkirbalikkan nilai-nilai budaya; dan telah mengarah pada 'turbulensi budaya', yakni kekacauan budaya akibat bercampurnya kondisi keteraturan (*order*) dan ketidakteraturan (*disorder*) budaya. Ada beberapa 'strategi kebudayaan posmodern' yang berperan besar dalam menciptakan perubahan kultural tersebut.²⁶

Pertama, dekonstruksi kultural (*cultural deconstruction*). Dekonstruksi kultural adalah sebuah strategi budaya berupa pembongkaran kode, tanda, atau konvensi kultural, khususnya kode-kode oposisi biner (*binary opposition*) yang membentuk sebuah kebudayaan, dan membiarkannya dalam penanguhan makna (*differance*). Dekonstruksi kultural merupakan sebuah kritik terhadap kebudayaan yang dibangun berdasarkan prinsip struktural, khususnya semiotika struktural yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure, yang dianggap terlalu statis, metafisis, dogmatik, dan transendental, yang anti perubahan dan menutup pintu bagi perubahan budaya. Kebudayaan dianggap terlalu bersandar pada pusat-*eidós*, *arché*, *telos*, *energeia*, *ousia* (hakikat, eksistensi, substansi, subjek) transendentalitas, kesadaran, kebajikan, Tuhan, manusia-yang padanya setiap makna bermuara, yang tidak toleran terhadap perubahan struktur atau makna-makna baru. Pusat-pusat yang bersifat metafisik itu dianggap dapat hadir sebagai jaminan dan fondasi kebudayaan. Kebudayaan sangat bersandar pada apa yang disebut petanda transendental, yakni sumber akhir bagi berbagai kemungkinan penanda, yang menciptakan kecenderungan logosentrisme dalam kebudayaan, yaitu kecenderungan kebudayaan merayakan pusat-pusat metafisik dan petanda-petanda transenden dengan menutup proses permainan dan produktivitas tanda. Dekonstruksi adalah gerakan melepaskan diri dari determinasi logosentrisme dan petanda transenden, agar mampu meningkatkan produktivitas kebudayaan, melalui permainan bebas penanda dan penolakan determinisme makna.²⁷

Kedua, simulasi kultural (*cultural simulation*). Simulakrum dan simulasi adalah konsep yang sangat sentral dalam pembicaraan dunia posmodern, khususnya kebudayaan hipermodern. Simulakrum adalah

²⁶ Ibid., hal. 430-432.

²⁷ Untuk mengetahui keterangan lebih lanjut tentang wawasan semiotika posmodernisme, lihat Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika ...*, hal. 153-174.

“sesuatu yang tampak atau dibuat seperti sesuatu yang lain,” seperti salinan (*copy*), imitasi, replika. Akan tetapi ia dibangun justru bukan karena oleh kesamaan, melainkan oleh ketidaksamamaan, dalam pengertian penyimpangan (*deviation*) dengan bentuk aslinya. Sementara simulasi adalah simulakrum dalam pengertian khusus yang disebut *pure simulacrum*, yaitu sesuatu tidak menduplikasi sesuatu yang lain sebagai model rujukannya, akan tetapi menduplikasi dirinya sendiri. Simulasi adalah penciptaan model secara artifisial, dalam rangka mendapatkan pengalaman sesuatu, yang seakan-akan sesuatu itu nyata, padahal tidak. Dalam simulasi, salinan dan asli, duplikasi dan original, model dan referensi adalah entitas yang sama.²⁸ Eksistensi simulasi yang melanda kebudayaan posmodern telah mengaburkan dan mengikis perbedaan antara yang nyata dan yang imajiner, yang benar dan yang palsu. Ketika tidak ada lagi kebenaran atau realitas, maka tanda tidak lagi melambangkan segala sesuatu. Akibatnya, menurut Baudrillard, “simulasi telah membunuh makna secara absolut”.²⁹ Prinsip simulasi ini telah mendominasi penampakan budaya, yang dapat dilihat di berbagai aspek kebudayaan, seperti simulasi sosial, politik, hukum, media, teror, perang, skandal, seni, musik, televisi, seksualitas, dan spiritualitas.

Ketiga, nostalgia budaya. Posmodernisme adalah kondisi ketika kebudayaan memalingkan wajahnya ke masa lalu, lewat kecenderungan *pastiche*, yaitu kecenderungan meminjaman dari unsur-unsur budaya masa lalu dalam rangka mengangkat dan mengapresiasinya. Pinjaman idiom, bentuk dan bahasa dari fragmen historis tertentu dilakukan dengan mencabutnya dari semangat zamannya dan menempatkannya ke dalam konteks semangat zaman masa kini. Relasi posmodernisme dengan masa lalu, dalam hal ini tidaklah tunggal, yaitu berupa replika masa lalu, melainkan relasi yang jauh lebih kompleks yang melibatkan berbagai strategi *bricolage*, intertekstualitas, dan eklektisisme.³⁰ Berbagai aspek budaya masa lalu diambil kembali dan dikombinasikan dengan berbagai unsur

²⁸ Yasraf Amir Piliang, *Dunia Yang ...*, hal. 430-431.

²⁹ George Ritzer, *Teori Sosial ...*, hal. 162-163.

³⁰ Intertekstualitasnya Julia Kristeva, dialogismenya Mikhail Bakhtin, bricolagenya Levi-Strauss dan *double coding*nya Charles Jenks, pada dasarnya memiliki hakikat makna yang sama. Intertekstualitas yang dikembangkan Kristeva, memiliki asumsi bahwa sebuah teks hadir dalam ruang dan waktu yang kongkrit, sehingga ia pasti memiliki relasi dengan teks-teks atau karya seni-karya seni lain dalam ruang dan waktu. Dialogisme,

masa kini (hipermodern), yang menghasilkan ekspresi budaya yang sangat plural, beragam, dan kompleks. Semangat posmodernisme kembali ke masa lalu (*back to the past*) adalah semangat imanensi kultural, yang cenderung merayakan aspek permukaan (*surface*) masa lalu itu, dan meninggalkan aspek mitologis dan transendentalnya.

Keempat, intertekstualitas kultural (*cultural intertextuality*). Intertekstualitas adalah salah satu konsep kunci dalam kebudayaan posmodernisme, sebagai reaksi terhadap cara berfikir strukturalisme dalam kebudayaan, yang sarat dengan simplifikasi kebudayaan, yaitu dengan melihat kebudayaan sebagai sebuah relasi struktural antara bentuk dan makna, atau penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*), yang dianggap bersifat tetap, statis, dan tidak berubah. Intertekstualitas, sebaliknya, melihat pentingnya dimensi ruang dan waktu (*time-space*) dalam kebudayaan, khususnya dimensi perubahannya. Sebuah kebudayaan tidak pernah eksis dalam ruang kosong, tidak otonom, tidak *self-determination*, tapi diproduksi dalam ruang dan waktu yang kongkret, sehingga pasti ada relasi atau dialog antara satu unsur kebudayaan dengan unsur kebudayaan lain. Dialogisme (*dialogism*) adalah garis penghubung yang harus ada di antara kebudayaan-kebudayaan dengan segala ekspresinya. Intertekstualitas merupakan jalan keluar posmodern dari keterasingan sebuah objek kebudayaan dari masyarakatnya. Hanya lewat dialog dengan kebudayaan-kebudayaan lain, sebuah kebudayaan dapat hidup, berkembang, berubah, dan bertransformasi. Sebagai sebuah strategi utama dalam posmodernisme, intertekstualitas dicirikan dengan sifat pengkodean ganda (*double coding*), yaitu semacam dialog antara teknik-teknik modern dan kode-kode kebudayaan masa lalu, dan juga dialog antara elit/populer, baru/lama.³¹

menurut Bakhtin adalah relasi-relasi yang harus ada di antara ungkapan-ungkapan dalam diskursus, bahwa tidak ada ungkapan yang tidak berkaitan dengan ungkapan lain. Dialogisme merupakan jalan keluar dari keterasingan teks atau karya dari masyarakat, jalan keluar dari sifatnya yang otonom dan referensi diri. Bricolage, menurut Levi-Strauss, adalah satu strategi intelektual dalam berkarya dengan membangun sesuatu dari material yang sudah ada baik yang bersifat fisik maupun non fisik (ide, gagasan, konsep atau gaya). Sementara *double coding* pada dasarnya digunakan Jencks untuk menerangkan proses dialogisme, yaitu dialog antara teknik-teknik modern dengan kode-kode kebudayaan masa lalu, antara elit/populer, lama/baru. Lihat Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika ...*, hal. 121-125.

³¹ Yasraf Amir Piliang, *Dunia Yang ...*, hal.432-433.

Kondisi Budaya Posmodernisme

Perkembangan posmodernisme - dan hipermodernisme di dalamnya - telah menciptakan berbagai kondisi baru kebudayaan, tepatnya berbagai realitas baru kebudayaan, sebagai konsekuensi dari penerapan berbagai teknologi mutakhir dalam dominasi dan hegemoni sistem kapitalisme global dewasa ini. Berbagai kondisi dan realitas baru dapat digambarkan berikut ini:

1. Hiperealitas budaya.

Hipermodernisme adalah sebuah kondisi, yang di dalamnya berkembang fenomena melampaui (*hyper*), yang disebut juga fenomenakses, ekstrimitas, dan superlatif. Segala sesuatu tumbuh dan berkembang melampaui batas yang seharusnya tidak dilampaui (overproduksi, overaksi, overekstasi, overinformasi, overkomunikasi). Kebudayaan berkembang tanpa fondasi, bergerak ke segala arah tanpa kendali dan dipenuhi dengan simulasi dan artifisialitas. Di dalamnya fakta tidak lagi merefleksikan realitas, ada bercampur dengan tiada (*nothingness*), yang nyata tumpang tindih dengan yang tidak nyata (*unreal*), realitas melebur dengan fantasi, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara model (*simulacrum*) dengan realitas. Realitas budaya telah diambil alih oleh image, ilusi, halusianasi dan simulasi yang menghasilkan realitas yang melampaui alam, referensi, nature, sifat dan batasnya, sehingga ilusi dianggap lebih riil dari realitas yang direpresentasikannya.³²

Setiap unsur kebudayaan berkembang ke arah titik yang seharusnya tidak dilewati (*hyper*): produksi berkembang ke arah *hyper-production* (produksi yang melampaui kapasitas konsumsi), konsumsi berkembang ke arah *hyper-consumption* (konsumsi yang melampaui kebutuhan), pasar ke arah *hypermarket* (pasar yang melampaui fungsi sebagai tempat transaksi barang), komoditi berkembang ke arah *hyper-commodity* (komoditi yang melampaui alam komoditi) dan komunikasi yang berkembang ke arah *hyper-communication* (komunikasi yang melampaui fungsi penyampaian pesan).³³

³² Ibid., hal. 433.

³³ Ibid., hal. 434.

2. Dromologi Budaya.

Budaya hipermodern adalah budaya yang dibangun di atas model kecepatan (produksi, distribusi dan konsumsi), yang menjebak manusia di dalam tekanan, tempo, irama dan durasi percepatannya (*velocity*). Segala sesuatu kini harus bergerak dengan cepat, sehingga menciptakan ruang kedangkalan dan menjauhkan manusia dari kedalaman, refleksi dan perenungan. Eskalasi pergantian citra, komoditi, gaya, fashion yang tinggi, telah menyerap persepsi dan kesadaran manusia, sehingga menjauhkannya dari pesan yang disampaikan. Kebudayaan yang telah terserap dalam arus percepatan (kapitalisme) membentangkan semacam kedangkalan kultural. Jameson menyatakan bahwa masyarakat posmodern dicirikan dengan superfisialitas dan kedangkalan. Setelah lelah dalam pencarian makna dalam kehidupan modern, orang-orang di dalam dunia posmodern “ingin hidup di permukaan untuk sementara”.³⁴ Akibatnya, produk-produk budaya posmodernisme hanya berupa image pada permukaan (imanan) yang tidak menyelidiki secara mendalam makna-makna yang mendasarinya.

3. Banalitas budaya.

Dekonstruksi terhadap oposisi biner budaya tinggi/nudaya rendah telah menciptakan konsekuensi kultural berupa berbaurnya budaya yang bernilai luhur dan rendah, asli dan palsu, otentik dan tiruan. Segala sesuatu yang selama ini dianggap dianggap tidak bernilai, buruk, rendah, dan pinggiran kini mendominasi ruang-ruang kebudayaan dengan mengambil alih posisi budaya tinggi, luhur, asli. Dekonstruksi semacam ini menciptakan logika kultural baru, yaitu logika banalitas, yang di dalamnya yang rendah, tidak bernilai, asli mengambil alih nilai-nilai luhur kultural. Dalam dunia banalitas, budaya-budaya yang dulu dianggap tidak penting, seperti hiburan, gaya hidup, game, kini menjadi sangat penting dan mendominasi ruang-waktu setiap orang.³⁵

Banalitas kebudayaan merupakan konsekuensi logis dari mesin kecepatan kapitalisme yang memerangkap masyarakat dalam

³⁴ George Ritzer, *Teori Sosial ...*, hal. 303-304.

³⁵ Yasraf Amir Piliang, *Dunia Yang ...*, hal. 435.

keharusan produksi dan konsumsi yang memenuhi dunia dengan produk dan komoditi. Kebudayaan kehilangan dimensi refleksi, yaitu dimensi internalisasi realitas (produk, hiburan, tontonan) dengan menilai kontribusinya terhadap subyektivitas manusia. Kondisi ini pada gilirannya menciptakan imanensi budaya, yaitu kecenderungan merayakan penampakan luar, peristiwa atau performansi, tanpa peduli dengan makna atau nilai-nilai dibalikinya.

4. Kompleksitas budaya.

Interelasi dan interdependensi yang kompleks di antara berbagai unsur budaya dalam skala global dewasa ini, menciptakan berbagai pertukaran, persinggungan, persilangan, dan multiplisitas di antara unsur-unsur budaya yang sangat kompleks. Interaksi antara unsur-unsur budaya etnis, lokal dan daerah dengan unsur-unsur budaya modern dan hipermodern, telah mengembangkan kebudayaan dalam sebuah relasi dan jaringan yang sangat kompleks, yang di dalamnya tidak ada budaya yang dapat eksis tanpa berhubungan dengan kebudayaan lain.³⁶ Dengan kata lain, tidak ada kebudayaan yang memiliki eksistensi otonom, karena intertekstualitas atau dialogisme antara berbagai kebudayaan akan selalu ada dalam konstruksi sebuah kebudayaan.

Posmodernisme dan Problem Kontekstualisasi Ajaran Islam

Historisitas al-Qur'an yang tercermin dari dialog yang dinamis antara al-Qur'an dengan masyarakat Arab sebagai penerimanya, menggambarkan dialektika yang intensif antara Tuhan sebagai pengarang al-Qur'an dengan realitas kemanusiaan. Meskipun al-Qur'an diyakini sebagai firman Allah yang bersifat ahistoris, namun intervensi dan keterlibatan al-Qur'an dalam wilayah kemanusiaan menandakan partisipasi emansipatoris al-Qur'an dalam merespon problem-problem yang dihadapi masyarakat Islam saat itu. Untuk memahaminya, menurut Komaruddin Hidayat, diperlukan *double analogy* yakni analogi konseptual antara *the world of human being* dengan *the world of God*, serta analogi historis kontekstual antara dunia Muhammad yang Arabik

³⁶ *Ibid.*, hal. 436.

dengan dunia umat Islam yang hidup di zaman dan wilayah yang berbeda sama sekali.³⁷

Historisitas al-Qur'an inilah yang menjadikannya mampu menjadi referensi umat Islam selama berabad dalam ruang dan waktu yang berbeda (*salih li kulli zaman wa makan*). Kehadiran al-Qur'an telah melahirkan pusat pusaran wacana keislaman yang tak pernah berhenti dan bergerak secara sentripetal dan sentrifugal. Gerak sentrifugal merepresentasikan gerakan di mana teks al-Qur'an ternyata memiliki daya dorong yang sangat kuat bagi umat Islam untuk melakukan penafsiran dan pengembangan makna atas ayat-ayatnya, sehingga terjadi pengembaraan intelektual. Sementara gerak sentripetal berarti bahwa meskipun seluruh wacana keislaman yang berlangsung belasan abad dan telah menghasilkan berbagai macam tafsir dan komentar, namun upaya untuk selalu merujuk kepada al-Qur'an juga semakin kuat.³⁸ Akumulasi dialektika al-Qur'an dengan berbagai aspek kehidupan umat Islam, menurut Wilfred Cantwell Smith, telah menciptakan tradisi kumulatif Islam,³⁹ yakni sebuah konstruksi religio-historis yang terus berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan sejarah kemanusiaan umat Islam.

Persinggungan Islam dengan berbagai tradisi dan budaya lain dalam sejarah peradaban Islam, telah memunculkan keragaman warna keberagaman umat Islam. Menurut Richard Ettinghausen, secara historis sejarah perkembangan tradisi Islam terpolakan dalam kerangka interaksi dan integrasi.⁴⁰ Artinya, dengan perkembangan wilayah Islam, Islam banyak bersentuhan dan berinteraksi dengan tradisi kultural lain, sehingga

³⁷ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 9

³⁸ *Ibid.*, hal. 15.

³⁹ Smith menyatakan: "*By 'cumulative tradition', I mean the entire mass of overt objective data that constitute the historical deposit, as it were, of the past religious life of the community in question: temple, scriptures, theological systems, dance patterns, legal and other social institution, conventions, moral codes, myths and so on; anything that can be and is transmitted from one person, one generation, to another, and that an historian can observe*". Wilfred Cantwell Smith, *The Meaning and End of Religion*, (Minneapolis: Fortress Press, 1991), hal. 156-157.

⁴⁰ Richard Ettinghausen, "Interaksi dan Integrasi dalam kesenian Islam", dalam Gustave E. Von Grunebaum (Ed.), *Islam Kesatuan dan Keragaman*, Terj. Effendi N. Yahya, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, TT), hal. 129.

menimbulkan keanekaragaman warna Islam. Akan tetapi, keragaman ini selalu terintegrasikan dalam *world view* (pandangan dunia) Islam yang memiliki karakter religius partikular yang membedakan dengan tradisi-tradisi lain non-Islam.

Dengan demikian, historisitas al-Qur'an merupakan *raison d'etre* keharusan ajaran Islam melakukan dialog yang dinamis dan kreatif dengan realitas kemanusiaan kontemporer, sehingga upaya kontekstualisasi ajaran Islam dengan problem-problem kekinian, merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi seiring perkembangan zaman, problem-problem kemanusiaan yang dihadapi umat Islam menjadi semakin kompleks. Keengganan untuk melakukan kontekstualisasi, akan berakibat serius, yakni memudarnya, atau bahkan hilangnya, kontrol agama terhadap realitas sosial penganutnya, seperti yang terjadi dalam agama Kristen di Barat.⁴¹ Era pencerahan yang menjadi cikal bakal dominasi rasionalitas di dalam masyarakat Barat, telah mengeliminir, bahkan menghilangkan, kontrol religius agama Kristen terhadap berbagai aspek profan penganutnya secara institusional.

Di dalam era posmodernisme, di mana budaya yang berkembang cenderung memarginalkan-atau bahkan menolak-nilai-nilai absolut transendental, mendekonstruksi oposisi-oposisi biner sehingga meleburkan yang bermoral dan amoral, yang benar dan yang salah, yang nyata dan yang palsu, telah menciptakan kehampaan spiritual. Hal-hal yang tidak memiliki kontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas hidup manusia, justru menjadi hal yang digemari. Akibatnya, masyarakat semakin terjebak dalam kedangkalan dan imanensi budaya. Segala sesuatu dikonsumsi hanya berdasarkan performansinya, tanpa melakukan perenungan atau refleksi makna dibaliknya. Kondisi ini merupakan tantangan besar yang harus direspon oleh semua elemen umat Islam, sehingga tidak terjebak dalam arus eksekutif negatif budaya posmodern.

Berbagai respon muncul terkait dengan menguatnya hegemoni budaya posmodernisme, di mana kapitalisme merupakan salah satu kekuatan penopangnya. Moeslim Abdurrahman, misalnya, menyarankan umat Islam membangun kekuatan dan perimbangan untuk melawan

⁴¹ Untuk keterangan lebih lanjut lihat, Bryan S. Turner, *Agama dan Teori Sosial*, Terj. Inyik Ridwan Muzir, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), hal. 189-229.

kapitalisme dengan menciptakan *the new society of civilitation*, dengan secara proaktif belajar dari pengalaman dan bekerja sama dengan orang lain.⁴² Sementara Amin Abdullah berpandangan bahwa hegemoni kapitalisme dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat ditolak kehadirannya. Hal yang perlu dilakukan manusia adalah menemukan kembali kesadaran beragama yang benar sebagaimana yang dibawa kitab suci. Untuk itu dibutuhkan rekonstruksi teologi global yang dicirikan dengan: 1) agama harus kembali pada konsepsi teologisnya yang benar, bukan menjadi teologi yang konformis atau oportunistis; 2) agama harus dikembangkan menjadi teologi yang bebas dan kritis; dan 3) agama tidak membatasi diri hanya untuk komunitas tertentu tapi *rahmatan lil 'alamin*.⁴³ Beberapa respon di atas menandakan perlunya membuat landasan normatif yang baru sebagai upaya kontekstualisasi ajaran Islam di era kontemporer, sebagai *balancing power* (kekuatan penyeimbang) hegemoni dan dominasi budaya posmodern.

Rekonstruksi Dakwah di Era Posmodernisme

Di tengah tuntutan kontekstualisasi ajaran Islam, dakwah sebagai media penyampaian doktrin-doktrin Islam, menempati posisi sangat signifikan dalam merealisasikan proses 'pembumian Islam' tersebut. Dakwah Islam dalam berbagai metodenya baik yang bersifat *bil hal* maupun *bil qaul*, menjadi sarana untuk mengkomunikasikan pesan-pesan transendental Tuhan kepada manusia, agar dapat diinternalisasikan dalam kesadaran umat Islam dan dimanifestasikan dalam sikap dan tindakan profannya. Dalam konteks ini, dakwah berperan mengawal umat Islam agar tetap memiliki keterikatan religius dengan *Ultimate Reality*, sehingga mampu mentransendensikan kehidupan dunianya di tengah perkembangan zaman, yang semakin dihegemoni oleh budaya materialistik dan hedonistik.

Seperti halnya kapitalisme mutakhir, yang selalu berupaya mereposisi kekuasaannya sesuai dengan kondisi zamannya guna mempertahankan

⁴² Moeslim Abdurrahman, *Islam Yang Memihak*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 37-47.

⁴³ Amin Abdullah, "Beragama Dalam Belenggu Kapitalisme, Sebuah Pengantar", dalam Fachrizal A. Halim, *Beragama Dalam Belenggu Kapitalisme*, (Magelang: IndonesiaTera, 2002), hal. xxi-xxii.

status quonya, maka Islam juga dituntut mereposisi kekuatannya agar mampu mengimbangi penetrasi budaya posmodern tersebut. Dakwah sebagai aktualisasi dan realisasi fungsi risalah mempunyai peran penting dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang kontekstual, sehingga mampu merespon problem-problem sosial yang dihadapi umat Islam kontemporer. Selain itu, dakwah juga merupakan sarana transformasi sosial, baik yang terkait dengan transformasi pemahaman maupun transformasi sikap dan tindakan. Proses komunikasi dan transformasi ini akan berjalan efektif, jika model pendekatan dakwah dilakukan tidak hanya dalam bentuk konvensional (ceramah) tapi juga melibatkan kegiatan multi dialog, seperti 'dialog amal' (karya), 'dialog intelektual' (filsafat), dan 'dialog budaya' (nilai). Efektivitas ini juga dapat dicapai dengan model dakwah yang mempertimbangkan beberapa hal, yakni: kondisi obyektif dakwah, kondisi subyektif dan faktor lingkungan dakwah.⁴⁴

Dengan kerangka pikir di atas, maka efektivitas dakwah akan tercapai, jika berbagai hal terkait dengan kondisi objektif dakwah, dalam hal ini adalah berbagai aspek yang terkait dengan budaya posmodern baik dari sisi ideologi, politik, strategi, dan kondisi budayanya, dikaji dan dianalisa guna mendapatkan kondisi obyektif dakwah. Hal ini penting untuk merekonstruksi strategi dakwah di tengah-tengah dominasi budaya posmodernisme ini. Beberapa landasan normatif diperlukan sebagai dasar intelektual rekonstruksi tersebut, sehingga berbagai eksese negatif posmodern yang dapat mengancam hilangnya spiritualitas dan kesadaran beragama manusia, dapat dihindari.

Pertama, afirmasi kritis.⁴⁵ Posmodernisme semestinya diterima secara kritis, dalam pengertian mengambil hal-hal positif yang bermanfaat bagi pengembangan ajaran Islam yang kreatif dan dinamis. Dalam hal ini, dakwah perlu membangun kesadaran kritis obyek dakwah, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh eksese negatif budaya posmodern dan menerimanya secara *taken for granted*, tanpa secara kritis memilah-milah aspek-aspek mana yang positif dan mana yang negatif bagi pengembangan subyektivitas dan spiritualitas manusia.

⁴⁴ Abdul Munir Mul Khan, *Ideologisasi Gerakan Dakwah*, (Yogyakarta: SIPRESS, 1996), hal. 205-208.

⁴⁵ Yasraf Amir Piliang, *Dunia Yang ...*, hal. 437.

Kedua, dekonstruksi yang rekonstruktif. Kebudayaan masa lalu yang dikonstruksi dan disegementasi berdasarkan oposisi biner, telah menciptakan oposisi-oposisi pusat/daerah, modern/tradisional, maju/terbelakang, elit/populer, luhur/murahan, laki-laki/perempuan. Oposisi biner ini dalam era pomodernisme telah didekonstruksi, sehingga mencairkan batas-batas masing-masing kategori, sehingga kebudayaan dihadapkan pada semacam kebebasan, kesetaraan dan demokratisasi yang tanpa batas. Dekonstruksi yang tanpa batas, akan berujung pada relativisme radikal, yang mengancam lenyapnya kategori-kategori nilai, makna dan kebenaran. Oleh karena itu proses dekonstruksi harus dilihat sebagai proses berkelanjutan, sehingga setiap pembongkaran harus diikuti oleh proses rekonstruksi dalam rangka mencari sebuah keseimbangan baru.⁴⁶ Dalam konteks ini, dakwah Islam berperan mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam proses rekonstruksi ini, sehingga kebebasan, kesetaraan dan demokratisasi yang tercipta tetap didasari oleh nilai-nilai religius. Karena relativisme radikal, akan menimbulkan hilangnya makna-makna dan kebenaran transendental yang selama ini dipegang teguh oleh umat Islam.

Ketiga, intertekstualitas substantif. Konsep intertekstualitas dalam posmodern, menawarkan dialog antara berbagai budaya yang bersifat imanen atau pada tataran bentuk performansinya saja dan tidak menyentuh substansinya, yang menyangkut nilai, norma dan makna. Dialogisme ini pada akhirnya hanya menciptakan sinkretisme budaya atau budaya baru yang mengambang, karena tidak memiliki makna dan nilai yang dapat mentransendensikan manusia.⁴⁷ Intertekstualitas harus dikembangkan, sehingga tidak hanya permukaannya saja tapi juga mencakup substansinya, yakni menyangkut nilai, makna dan kebenaran. Kekayaan nilai di Indonesia yang terdapat dalam berbagai budaya, ras, agama, gender, merupakan potensi positif yang harus dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal. Intertekstualitas substantif di antara berbagai nilai tersebut, menjadi sangat penting di tengah derasny arus budaya materialistik, karena dialog makna akan memperkaya nilai dan makna individu dalam proses pengembangan subyektivitas dan spiritualitasnya.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 437-438.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 438.

Keempat, dedromologisasi kultural. Perangkap kecepatan dan percepatan dalam wacana hipermodernitas, yang telah merampas ruang-ruang bagi refleksi, perenungan dan pendalaman makna, harus mampu dilepaskan dengan menciptakan sebuah keseimbangan yang dinamis antara tingkat kecepatan dan kemampuan manusia dalam memahami, memaknai dan menginternalisasikan nilai-nilainya. Untuk itu, harus diciptakan ruang yang memadai bagi hidupnya ekspresi-ekspresi kebudayaan yang lebih luhur, bernilai dan bermakna.⁴⁸ Ruang inilah yang harus diciptakan secara kreatif oleh dakwah Islam, dengan menggunakan berbagai strateginya sehingga efektif di masa kontemporer ini. Ruang-ruang refleksi yang diciptakan sebagai ruang jeda di tengah dromologi budaya posmodernisme, adalah ruang untuk merefleksikan realitas yang ada dan memaknai kehidupan profannya untuk ditransformasikan dan ditransendensikan bagi peningkatan kualitas makna hidupnya.

Kelima, kompleksitas dalam keawasan (*alert*). Kebudayaan kontemporer terbentuk sebagai konsekuensi pertemuan yang kompleks antara unsur-unsur budaya posmodern dan hipermodern dengan unsur-unsur budaya lokal, etnis, dan daerah, yang di dalamnya terdapat peluang sekaligus ancaman, keuntungan sekaligus kehilangan atau paradoks kebudayaan. Pertemuan kebudayaan lokal dengan kebudayaan posmodern akan menghasilkan sintesis baru, sehingga akan menghasilkan peluang produktif bagi perkembangan budaya. Sebaliknya, pergesekan dan benturan budaya dapat juga menimbulkan ketidakstabilan (*disorder*) budaya. Oleh sebab itu, sikap awas (*alert*) diperlukan secara terus menerus untuk menghindari eksese negatif dari kompleksitas budaya tersebut.

Kelima dasar normatif di atas, merupakan beberapa solusi alternatif untuk mengatasi eksese negatif yang ditimbulkan oleh budaya posmodernisme dan hipermodernisme, yang hadir dan menjajah hampir di setiap aspek kehidupan manusia, sehingga sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari. Resistensi radikal dengan menolak kehadiran budaya posmodernisme dengan mengimajinasikan kembali ke kehidupan ideal pada masa nabi SAW, tentu bukanlah solusi yang bijaksana. Karena hal itu hanya akan menciptakan romantisme historis, dan menjadikan umat

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 438-439.

Islam eksklusif dan tersisihkan di dalam pentas pertarungan nilai. Kondisi ini, malah akan semakin memperkuat hegemoni budaya posmodernisme terhadap kehidupan manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, partisipasi aktif dan kritis perlu selalu diupayakan, dengan cara mentransformasikan nilai-nilai Islam dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam interaksinya dengan budaya-budaya yang sedang berkembang, sehingga Islam mampu menjadi *balancing power* bagi dominasi kebudayaan posmodernisme, yang ditopang oleh kapitalisme, yang selalu mampu mereposisi diri sesuai dengan perkembangan zaman.

Untuk itu, rekonstruksi strategi dakwah diperlukan guna mengatasi problem sosial budaya yang dihadapi umat Islam pada era posmodernisme ini. Kelima landasan normatif di atas, sebagai counter budaya posmodernisme, bisa dijadikan dasar atau pertimbangan dalam upaya rekonstruksi tersebut. Dengan terus memperbaharui strategi dakwah sesuai dengan kondisi subyektif, obyektif dan lingkungan dakwah, diharapkan nilai-nilai Islam dapat selalu hadir dalam kehidupan manusia, khususnya umat Islam di manapun dan kapanpun. Dalam konteks inilah, statemen *al-Islam shalih li kulli zaman wa makan* dan *al-Islam rahamatan lil 'alamin*, dapat terealisasikan.

PENUTUP

Perkembangan ideologi posmodernisme, telah menciptakan bentuk-bentuk kebudayaan baru kontemporer. Hiperealitas budaya, dromologi budaya, banalitas budaya dan kompleksitas budaya, merepresentasikan bentuk-bentuk budaya baru yang diciptakan oleh posmodernisme lewat berbagai politik dan strateginya. Kondisi ini, merupakan tantangan dan sekaligus peluang yang harus disikapi secara kritis, sehingga mampu menghadapi tantangannya dan memanfaatkan peluangnya secara maksimal.

Interaksi dan dialog antar budaya, ideologi dan peradaban, merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Sejarah peradaban Islam, menjadi saksi dialektika Islam dengan kebudayaan yang ada, sehingga Islam dapat diterima di manapun dan menciptakan keragaman warna tradisi Islam. Untuk itu, diperlukan upaya kontekstualisasi sebagai solusi umat Islam sekarang mengatasi berbagai ekkses negatif budaya.

posmodernisme. Dalam hal ini, dakwah memiliki peran penting dalam mengkomunikasikan nilai-nilai Islam secara efektif dengan merekonstruksi strategi baru sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Strategi yang tepat dan kontekstual, akan berimplikasi terhadap transformasi pemahaman, sikap, dan tindakan umat Islam, sehingga mereka tidak terjebak dalam belenggu budaya negatif posmodernisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Moeslim *Islam Yang Memihak*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Abidin, Zainal *Filsafat Manusia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Abdullah, Amin "Beragama Dalam Belenggu Kapitalisme, Sebuah Pengantar", dalam Fachrizal A. Halim, *Beragama Dalam Belenggu Kapitalisme*, Magelang: IndonesiaTera, 2002.
- Asyhadie, Nuruddin *Hampiran Hamparan Gramatologi Derrida*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Ettinghausen, Richard "Interaksi dan Integrasi dalam kesenian Islam", dalam Gustave E. Von Grunebaum (Ed.), *Islam Kesatuan dan Keragaman*, Terj. Effendi N. Yahya, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan,
- Fromm, Erich "Mendidik Si Automaton", dalam Omi Intan Naomi (Peny.), *Menggugat Pendidikan*, Terj. Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Hardiman, Fransisco Budi *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Buku Baik, 2003.
- Hidayat, Komaruddin *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina, 1996 Marcuse, Herbert *Manusia Satu Dimensi*, Yogyakarta: Bentang, 2000.

Mulkhan, Abdul Munir *Ideologisasi Gerakan Dakwah*, Yogyakarta: SIPRESS, 1996.

———, *Hipersemiotika, Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*. Yogyakarta: Jalasutra, 2003.

Piliang, Yasraf Amir *Transpolitika: Dinamika Politik Di Dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta: Jalasutra, 2005.

Rahmat, Jalaluddin *Islam Aktual*, Bandung: Mizan, 1992.

Ritzer, George *Teori Sosial Postmodern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.

S. Turner, Bryan *Agama dan Teori Sosial*, Terj. Inyik Ridwan Muzir, Yogyakarta: IRCiSoD, 2006.

Smith, Wilfred Cantwell, *The Meaning and End of Religion*, Minneapolis: Fortress Press, 1991,

Thompson, John B. *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2007 Piliang, Yasraf Amir, *Dunia Yang Dilipat, Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*, Yogyakarta: Jalasutra, 2004.